

Proyek Tol Trans-Sumatera Tunggu Penyempurnaan PP

JAKARTA – Pemerintah memastikan pembangunan jalan tol Trans-Sumatera tetap terlaksana. Namun demikian, pelaksanaan pembangunan tol masih menunggu revisi Peraturan Pemerintah (PP) No 15/2005 tentang Jalan Tol, termasuk Perpres penugasan BUMN PT Utama Karya (HK) sebagai wakil pemerintah untuk membangun jalan tol tersebut.

“Sudah disepakati bahwa pembangunan jalan tol Trans-Sumatera menunggu selesainya penyempurnaan PP,” kata Menteri BUMN Dahlan Iskan usai mengikuti Rapat Koordinasi Jalan Tol Sumatera dengan Menko Perekonomian, di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (2/5).

Selain Menko Perekonomian Hatta Rajasa dan Dahlan Iskan, juga hadir Menteri PU Djoko Kirmanto, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas Dedi Priatna, dan Kepala Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT) Achmad Ghazaly.

Menurut Dahlan, revisi PP meliputi aturan yang memungkinkan BUMN dapat ditunjuk untuk melaksanakan pembangunan jalan tol di area yang secara finansial sulit dibangun oleh swasta.

“Revisi juga untuk memastikan BUMN yang membangun proyek tersebut harus 100% sahamnya dimiliki pemerintah,” kata Dahlan.

Pemerintah sebelumnya sudah menyiapkan PT Utama Karya sebagai pihak yang membangun proyek jalan

tol sepanjang 2.700 kilometer tersebut.

“Utama Karya belum ditunjuk, namun akan diajukan kepada Presiden, karena merupakan satu-satunya BUMN Karya yang paling siap dan sahamnya masih 100% dimiliki pemerintah. BUMN yang sudah merupakan perusahaan publik tidak diperbolehkan,” ujar Dahlan.

Dalam pengerjaan pembangunan jalan tol Trans-Sumatera tersebut, HK dimungkinkan untuk membangun sendiri, menggandeng perusahaan lain, dan dapat bekerja sama dengan membentuk konsorsium.

Ruas tol Trans-Sumatera yang akan dibangun pemerintah melalui program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) ini terbagi menjadi empat koridor utama dan tiga koridor prioritas jaringan jalan tol. Keempat koridor utama jaringan jalan tol itu adalah tol Lampung-Palembang sepanjang 358 kilometer (km), Palembang-Pekanbaru (610 km), Pekanbaru-Medan (548 km), dan Medan-Banda Aceh (460 km). Adapun perkiraan investasi pengerjaan empat koridor jalan tol itu mencapai sekitar Rp 298 triliun. Tiga koridor prioritas pembangunan adalah tol Palembang-Bengkulu (303 km), Pekanbaru-Padang (242 km), dan Medan-Sibolga (175 km).

PMN Rp 3 Triliun

Terkait pengajuan dana penyertaan

modal negara (PMN) oleh Utama Karya sebesar Rp 3 triliun untuk menambah pembiayaan pembangunan proyek tersebut, Dahlan Iskan mengatakan masih menunggu persetujuan pemerintah.

“PMN diusulkan sebesar Rp 3 triliun, namun hal itu menunggu persetujuan melalui pembahasan APBN-P 2013,” ujar dia.

Menteri BUMN juga berharap revisi PP dan persetujuan PNM untuk Utama Karya dapat diselesaikan secara bersamaan, sehingga pembangunan proyek jalan tol Trans-Sumatera segera direalisasikan.

“Semua orang ingin jalan tol tersebut cepat-cepat dibangun. Apalagi yang kita tunggu, karena semua sesungguhnya sudah siap,” ujar Dahlan.

Sebelumnya Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Dedi Priatna mengatakan, pembangunan tol Trans-Sumatera akan menjadi proyek percontohan pemerintah yang pengerjaannya dilakukan perusahaan BUMN. Pemerintah memutuskan BUMN untuk mengerjakan proyek tersebut, karena ingin meniru konsep pembangunan infrastruktur di Tiongkok, Malaysia, dan Vietnam.

“Konsep Tiongkok adalah ketika pemerintah mengerjakan proyek infrastruktur besar, itu dikerjakan dulu oleh BUMN. Setelah menguntungkan, proyek baru dijual kepada pihak swasta,” paparnya. (key)